

## KEHADIRAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA SEBAGAI MANAJEMEN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK

Muhammad Sidiq<sup>1</sup>, Robi Cahyadi Kurniawan<sup>2</sup>, Arizka Warganegara<sup>3</sup>, Fitria Barokah<sup>4</sup>

*Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia*<sup>1,2,3,4</sup>

E-mail: muhsidiq18@gmail.com

### ABSTRAK

*Konflik di tubuh partai politik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, dan tidak jarang konflik internal dapat menciptakan perpecahan partai. Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana konflik internal partai PKS dapat melahirkan partai baru (Gelora). Tulisan ini menggunakan studi kepustakaan, dengan data yang digunakan adalah buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal yang berkaitan dengan konflik internal partai politik dan pelebagaan partai politik. Berdasarkan hasil analisis, tulisan ini menjelaskan kelahiran partai Gelora disebabkan adanya perbedaan ideologi politik antara Anis Matta dan Hilmi Aminudin, dan pembaharuan yang diinginkan Anis Matta mendapat penolakan dari kader PKS. Melihat pelebagaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terbilang rendah, karena partai tidak dapat mengatasi konflik internalnya sendiri sehingga menciptakan perpecahan dan melahirkan partai baru (Partai Gelora). Bentuk manajemen konflik yang diambil oleh pihak berkonflik yaitu dengan mendirikan partai baru yaitu gelora. Dengan kata lain, konflik tidak akan berlanjut dalam internal, karena ada pihak yang memutuskan pecah partai.*

**Kata Kunci:** *Partai Politik, Konflik Internal, Pelebagaan*

### ABSTRACT

*Conflict within political parties is something that cannot be avoided, and not infrequently internal conflicts can create party divisions. This paper aims to analyze how the internal conflict of the PKS party can give birth to a new party (Gelora). This paper uses a literature study, with the data used being books and primary or original scientific reports contained in articles or journals related to internal conflicts of political parties and the institutionalization of political parties. Based on the results of the analysis, this paper explains that the birth of the Gelora party was due to differences in political ideology between Anis Matta and Hilmi Aminudin, and the reforms that Anis Matta wanted were rejected by PKS cadres. Seeing the institutionalization of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) is still relatively low because the party cannot overcome its own internal conflicts, thus creating divisions and giving birth to a new party (Partai Gelora). The form of conflict management taken by the conflicting parties is by*

*establishing a new party, namely Gelora. In other words, the conflict of action will continue internally, because there are parties who decide to break up the party.*

**Keywords:** *Political Party, Internal Conflict, Institutional*

## **PENDAHULUAN**

Dengan semakin kuatnya peran Parpol dalam kehidupan negara demokrasi, mulai timbul konflik-konflik dalam tubuh Parpol baik itu konflik sosial maupun konflik politik. Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Arianto et al., 2021).

Menilik dinamika yang terjadi di tubuh partai politik di Indonesia diramaikan dengan konflik, perpecahan, kepengurusan ganda dan sebagainya. Kader-kader partai politik memiliki persaingan antara sesama untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga konflik tingkat nasional maupun daerah seperti partai nasional maupun partai lokal tidak lepas dari konflik internal. Ini diakibatkan ideologi dan komunikasi yang kurang baik di dalam tubuh partai. Konflik internal partai politik khususnya di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, bahkan fenomena ini sudah muncul di era sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam perjalanan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang berakar dari Sarekat Islam. PSII dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perpecahan internal.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam perjalanan partai politik ialah kemunculan konflik internal yang muncul dan bahkan menyebabkan kemunculan partai-partai baru diluar partai politik yang sudah ada. Konflik internal ini tentunya mengganggu peran dari partai politik itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Nurhasim (2013) menggambarkan adanya perbedaan dan konflik internal pada tubuh partai politik memancing anggota untuk meninggalkan dan memilih keluar kemudian membuat partai baru. Konflik internal parpol disertakan dengan faktor yang dipengaruhi oleh kuatnya tokoh yang mengambil peran penting sebagai penggerak parpol, sehingga perselisihan internal parpol akan menyebabkan tokoh-tokoh pendiri partai meninggalkan parpol yang dibentuknya semula (Barokah et al., 2022).

Pandangan Harmel & Robertson (1985) bahwa di antaranya dibentuk untuk menjawab tantangan isu-isu baru. Partai baru ini terkait dengan pembelahan dalam sistem kepartaian. Kemunculan partai baru bagi Harmel juga terkait dengan peristiwa sejarah tertentu di masyarakat. Mair dan Erlingsson dalam Bolin (2007) melihat interpretasi yang serupa bahwa

partai baru merupakan partai yang awalnya bukan sebagai anggota sistem partai yang pernah terkonsolidasi. Secara umum partai-partai baru ini muncul dalam tiga cara yang berbeda. *Pertama*, partai baru muncul sebagai konsekuensi penggabungan dua atau lebih partai yang didirikan. *Kedua*, partai-partai baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. *Ketiga*, partai baru muncul sebagai partai yang benar-benar baru, tidak terkait dengan partai lain.

Bersamaan dengan semakin berperannya parpol dalam kehidupan negara yang demokratis, timbul konflik-konflik di dalam tubuh parpol. Pelembagaan partai politik juga mengatur tentang bagaimana partai tersebut menjalankan peran dan fungsinya sekaligus dalam menyelesaikan konflik baik eksternal maupun internal (Mardaya et al., 2019). Konsep pelembagaan partai politik dikemukakan oleh Randall & Svåsand (2002) bahwa pelembagaan partai politik merupakan suatu proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya. Oleh karena itu, jika pelembagaan partai politik masih rendah, konflik internal partai tidak terselesaikan, bahkan berujung perselisihan internal parpol hingga mengakibatkan parpol bersangkutan pecah.

Salah satu partai baru pada Pemilu 2024 yang terbentuk akibat perpecahan internal ialah Partai Gelora.

Partai Gelora mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis atau partai tengah, kelahirannya tidak bisa lepas dari faksionalisasi di salah satu partai Islam yaitu PKS (Argenti, 2021). Partai Gelora didirikan 28 Oktober 2019 dan dideklarasikan pada 10 November 2019 oleh mantan tokoh muda berpengaruh PKS. Di ketuai oleh Anis Matta. Partai Gelora Indonesia terbentuk karena beberapa kadernya terlibat dalam pusaran konflik di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, banyak petinggi Partai Gelora merupakan bekas kader yang sudah keluar dari PKS (CNN Indonesia, 2019). Hadirnya Partai Gelora tentu mengejutkan banyak pihak, terlebih budaya organisasi di rumah sebelumnya terbilang sangat rapih dalam mengelola konflik politik di internal partai (Argenti, 2021).

Singkatnya, kehadiran Partai Gelora pada ranah politik dan publik karena adanya konflik yang menjerat PKS. Disintegrasi kedua partai ini berawal mulai dari perbedaan pandangan mengenai orientasi partai politik antara Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Dimana, Anis Matta kurang menyetujui adanya partai politik yang tertutup dan Anis Matta menghendaki PKS sebaiknya menjadi partai yang lebih terbuka agar dapat menyesuaikan diri dengan model demokrasi yang ada di Indonesia (Widyana, 2022).

Partai Gelora memilih jalannya sendiri, memilih ideologi berbeda dengan partai induk, yakni nasionalis sebagai pijakan berpolitik. Pilihan

mendirikan partai nasionalis berasas pancasila. Dengan mengungus ideologi yang berbeda, partai ingin memperluas ceruk pemilih, tidak dari satu segmentasi pemilih tertentu, tapi merangkul semua entitas politik di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan, meski mendeklarasikan sebagai partai nasionalis, sepertinya stigma sebagai kelompok Islamis tetap ada, terlebih di media Anis Matta menjelaskan partainya nasionalis jati dirinya Islam, sebuah diksi baru dalam panggung politik nasional, biasanya diksinya partai nasionalis religius (Argenti, 2021).

Penelitian ini berfokus pada pembentukan partai politik baru sebagai pecahan dari partai induknya (Partai Gelora dari Partai Keadilan Sejahtera) disebabkan oleh konflik internal partai politik. Penelitian ini berhipotesis bahwa pembentukan partai politik baru dapat dikatakan sebagai manajemen konflik, dengan alasan pelembagaan parpol masih rendah sehingga memutuskan untuk mendirikan partai politik baru. Kasus konflik internal partai dianalisis dengan menggunakan metode pemetaan konflik SIPABIO menurut Susan (2009) meliputi, *source* (sumber konflik), *issues* (isu-isu), *parties* (pihak-pihak yang berkonflik), *attitude/feelings* (sikap; perasaan dan persepsi), *behavior* (perilaku/tindakan), *intervention* (intervensi/campur tangan pihak lain), dan *outcome* (hasil akhir/dampak dari konflik).

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian dari Budiatri et al (2017) dengan judul faksi dan konflik internal partai-partai politik di Indonesia era reformasi. Budiatri menjelaskan Ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis merupakan penyebab konflik. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan. Penelitian sejenis dari Barokah et al (2022) berjudul Disrupsi Politik: peluang dan tantangan partai politik baru jelang pemilu 2024, menjelaskan tantangan munculnya partai politik baru pada pemilu 2024 yaitu adanya konflik internal partai dapat mendorong kader-kader partai keluar sehingga mendirikan partai baru. Tantangan lainnya, disrupsi akan membajak peran partai politik jika parpol enggan mengikuti arus disrupsi. Penelitian dari Hanafi (2018) dengan judul kemunculan dan tantangan partai politik baru pada pemilu 2019. Penelitian Hanafi ini membahas partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain dan tantangan partai baru adalah tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis bagaimana kehadiran Partai Gelora sebagai manajemen konflik internal partai. Rendahnya pelembagaan partai

ditengarai sebagai pemicu konflik internal dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga munculnya spesies partai baru yaitu Partai Gelora. Fokus kajian penelitian inilah sebagai bentuk *novelty* penelitian.

## **METODE**

Tulisan ini menggunakan studi kepustakaan, menurut Sugiyono (2019) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal (tercetak dan/atau non-cetak) berkenaan dengan sejarah matematika dan peletakkannya dalam aktivitas pembelajaran yang kaitannya dengan konflik internal partai politik dan pelembagaan partai politik..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Melahirkan Partai Gelora**

Tidak ada satu masyarakat atau organisasi pun yang bisa lepas dari konflik. Konflik menurut Winardi (1994) adalah adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau pun organisasi-organisasi. Sejalan dengan pendapat Winardi, menurut Liliweri (1997) konflik adalah bentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Makna konflik secara sederhana diartikan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di antara perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan kepentingan politik, sehingga disebut juga sebagai konflik politik. terdapat tiga macam konflik politik. *Pertama*, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. *Kedua*, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. *Ketiga*, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik (Rauf, 2001) dalam (Romli, 2018).

Di Indonesia, konflik internal partai politik sudah bukan merupakan hal yang baru, bahkan fenomena ini sudah muncul di era sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam perjalanan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang berakar dari Sarekat Islam. Menurut Sjamsuddin et al (1988)

perpecahan dalam parpol bisa disebabkan tiga hal meliputi, perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan persaingan kepemimpinan dalam partai. Terdapat beberapa macam konflik internal dalam tubuh parpol, yaitu :

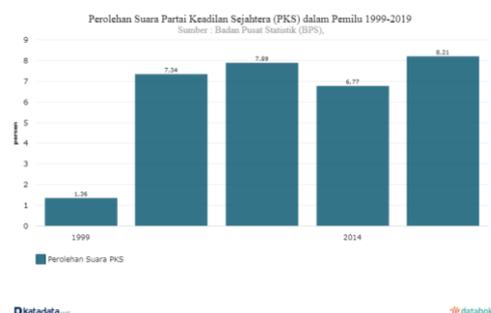
1. Karena partai tidak memiliki *platform* yang jelas, sehingga mengakibatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah hal itu memecah belah partai.
2. Faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya figur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap mampu menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagai calon pengganti.
3. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul tokoh baru dalam parpol menunjukkan kegagalan parpol melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam perjalanan partai politik ialah kemunculan konflik internal yang

muncul dan bahkan menyebabkan kemunculan partai-partai baru diluar partai politik yang sudah ada. Salah satu partai yang mengalami gejolak internal adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang lahir dari gerakan dakwah Jamaah Tarbiyah ini cukup mengejutkan ketika konflik internal terjadi di dalam partai yang menampilkan diri sebagai partai dakwah ini. Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal sebagai partai dengan militansi kader serta kesolidan antar kader yang kuat mengejutkan publik ketika konflik internal mereka memanaskan hingga berujung dengan lahirnya Partai Gelora Indonesia pada tahun 2019.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang memiliki catatan yang baik dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya. Partai dakwah ini mampu menorehkan pencapaian positif selama perjalanan politiknya, dapat dilihat pada gambar 1.

**Gambar. 1 Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 1999-2019**



Sumber: (Databoks.katadata.co.id, 2022)

Berdasarkan gambar 1, dibalik perkembangan positif yang diperlihatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mereka juga memiliki permasalahan berupa konflik internal yang terjadi di dalam tubuh partai. Akmar (2019) menjelaskan bahwa konflik internal Partai Keadilan Sejahtera berlangsung sejak tahun 2004

(dapat dilihat pada tabel 1). Bermula dari perbedaan pandangan hingga melahirkan adanya faksi di dalam tubuh partai, yaitu faksi keadilan dan sejahtera. Konflik inilah yang akhirnya memicu munculnya GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia) serta munculnya fenomena mundurnya kader-kader PKS.

**Tabel 1. Catatan Kasus Faksionalisasi dan Konflik Internal PKS di Era Reformasi**

Tahun	Faksi	Latar Belakang	Kecenderungan
2004	Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan	Perbedaan pandangan hidup kader atas sumber daya finansial atau materi	Ideologi
2008-2010	Kelompok Moderat dan Kelompok Ortodoks	Perbedaan pandangan untuk menjadikan partai terbuka bagi non muslim	Ideologi
2016	Faksi Sejahtera dan Keadilan	PKS mengalami konflik internal setelah Fahri Hamzah yang merupakan loyalis Anis Matta (pimpinan PKS periode sebelumnya) tidak masuk ke dalam struktur pengurus harian Dewan Pengurus Pusat PKS.	Ideologi
2018	Faksi Sejahtera dan Keadilan	Perpecahan terjadi akibat DPP mewajibkan seluruh Caleg PKS menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong.	Ideologi

Sumber: (Budiatri & Putri, 2018) dalam (Akmar, 2019)

GARBI merupakan gerakan yang dipimpin oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah. Gerakan ini juga memunculkan fenomena mengundurkan diri yang dilakukan kader-kader dari PKS. Diantara kader yang akhirnya keluar dari PKS diantaranya adalah Anis Matta, Mahfudz Siddiq dan Sita Sukanto. GARBI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi masyarakat. Deklarasi GARBI sebagai ormas

dilakukan diberbagai daerah, pertama kali di Makassar pada bulan September 2018. GARBI yang awalnya mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat akhirnya bertransformasi menjadi sebuah partai politik yaitu Partai Gelora Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019. Diketuai oleh Anis Matta yang merupakan mantan Presiden PKS tahun 2013-2015.

Pemetaan konflik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik. Ada beberapa pendapat ahli terkait pemetaan konflik seperti Fisher (2001), dan Amr Abdalla (2002), seperti yang dikutip Susan (2009). Menurut Fisher, pemetaan konflik memberi gambaran awal mengenai berbagai sikap, perilaku dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Pemetaan konflik ini meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling memperelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.

Pendekatan analisa konflik untuk menemukan dan mencapai penyelesaian konflik dilakukan melalui model SIPABIO yaitu:

Dilihat dari sumber konflik (*source*), konflik internal dalam tubuh PKS yang melahirkan parti baru yaitu Gelora disebabkan perbedaan ideologi yang di inginkan masing-masing elit partai yaitu Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Anis Matta menginginkan ideologi pembaharuan, beberapa kader PKS melakukan penolakan karena lebih baik tetap konsisten untuk menjalankan visi dan misi PKS dengan ideologi partai Islam. Akhirnya keputusan sejumlah pengurus PKS

mengundurkan diri dan membentuk Partai Gelora. Pemetaan konflik berdasarkan *source* ini dijelaskan oleh Abdalla (2002) dalam Susan (2009), bahwa konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda dengan melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda.

Dilihat dari *issues*, pemicu munculnya konflik ini atas dasar pemikiran Anis Matta terkait dikotomi antara Islam dan nasionalisme. Secara sederhana, dengan adanya dikotomi-dikotomi tersebut yang sebaiknya harus segera dihapuskan karena menyesatkan yang dibuat masa lalu, karena yang Islam tidak mau disebut sebagai tidak nasionalis; yang nasionalis tidak mau disebut dengan Islam atau tidak religius. Dengan demikian, muncullah pemikiran yang dibawa Partai Gelora pembangunan bangsa yang satu dengan menjunjung tinggi nilai solidaritas dan rasa nasionalisme. Abdalla (2002) dalam Susan (2009), menjelaskan pula bahwa isu-isu dalam pemetaan konflik menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan diantarapihak yang berkonflik, seperti cara pemikiran Anis Matta memandang Islam dan nasionalisme.

Dilihat dari pihak-pihak yang berkonflik (*parties*), pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan

konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan pihak netral untuk mengintervensi konflik. Konflik dalam tubuh partai, melibatkan pihak antara kader-kader partai PKS Anis Matta dan Hilmi Aminudin Di pihak Anis Matta, terdapat beberapa kader yang terlibat dalam pusaran konflik di internal PKS dan ikut serta dalam pembentukan partai baru, meliputi: Fahri Hamzah yang menduduki posisi wakil ketua umum Partai Gelora. Fahri sendiri sempat berkonflik dengan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman. Konflik itu lantas membuat Fahri didepak sebagai kader PKS. Kemudian mantan kader PKS Mahfudz Siddik yang menduduki posisi sekretaris jenderal Partai Gelora. Mahfudz sendiri sempat menjabat sebagai ketua Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS DPR 2009-2014. Ahmad Riyaldi yang menjadi bendahara umum Partai Gelora. Riyaldi pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Pertimbangan PKS periode 2009-2014 dan anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS. Triwisaksana yang menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Nasional Partai Gelora. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Sani itu pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Syuro PKS. Ada pula mantan kader PKS Rofi Munawar dan Musyafa Ahmad Rahim (CNN Indonesia, 2020).

Menilik dari *attitudes/feelings* (sikap). Abdalla (2002) dalam Susan (2009) sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul

dalam bentuk positif dan negatif bagi konflik. Pada dasarnya, sikap yang mempengaruhi pola perilaku konflik adalah keinginan untuk mendirikan partai baru dikarenakan adanya penolakan atas keinginan Anis Matta memasukan ideologi pembaharuan dalam tubuh partai. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena pemikiran Anis Matta yang mengakibatkan keinginan memisahkan diri dari partainya.

Melihat dari perilaku/tindakan (*behavior*), perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*. Dalam hal ini, pihak berkonflik seperti Anis Matta melakukan tindakan *coercive action* atau bentuk tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin melakukannya dengan meninggalkan partainya dan membuat partai politik baru yaitu (Partai Gelora). Selanjutnya, *intervention* atau campur tangan pihak lain. Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian. Dalam penyelesaian konflik tidak ada campur tangan pihak lain. *Outcome* (hasil akhir). *Outcome* merupakan dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi. Dalam hal ini, hasil akhir dari konflik internal dalam tubuh PKS melahirkan partai baru yaitu Partai Gelora.

**Pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera Masih Lemah**

Konflik di tubuh partai politik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Didalam Partai Politik selalu ada kepentingan yang diwakili oleh kelompok yang ada di internal partai tersebut. Keberadaan faksi didalam partai sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Partai politik adalah sebagian faksi yang berada didalam satu tubuh yaitu partai politik. Gesekan antar faksi tersebut ternyata tidak selamanya dapat di selesaikan secara organisasi. Hal ini karena ketimpangan-ketimpangan serta mulai melamahnya fungsi pelembagaan partai.

Dalam pelembagaan partai politik juga mengatur tentang bagaimana partai tersebut menjalankan peran dan fungsinya sekaligus dalam menyelesaikan konflik baik eksternal maupun internal. Sehingga pelembagaan partai politik memiliki peran yang sangat penting untuk dilakukan, agar partai politik dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Anggaran Dasar (AD) merupakan peraturan dasar dalam suatu partai politik. Aspek-aspek yang dijelaskan di dalam Anggaran Dasar (AD) yaitu visi misi, kedaulatan, tujuan dan fungsi suatu partai politik, tata cara kerjasama partai, kepeguruan, dan pemberhentian keanggotaan dalam suatu partai politik, serta aturan yang mengatur tentang pemilu, pilkada dan fraksi, dan lain-lain (Mardaya et al., 2019).

Kegagalan organisasi konflik internal yang dialami oleh partai-partai politik, baik partai politik besar maupun partai politik kecil, secara umum bersumber dari pelanggaran terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan. Partai politik yang seharusnya menjadi institusi utama bagi pembangunan dan pematangan pengembangan demokrasi seringkali mengalami konflik internal sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasi di internal masing-masing partai politik. Tidak jarang keputusan politik ditentukan secara sepihak oleh segelintir elite partai politik. Partai politik di Indonesia belum memiliki tradisi kuat untuk menjalankan organisasi secara rasional dan demokratis.

Menilik kualitas tata kelola partai politik dari masa ke masa masih terbilang rendah, hal ini dikarenakan belum termanisfetasikan empat dimensi pelembagaan (*institutionalisme*) partai politik. Sejalan dengan Scott Mainwaring, Lemahnya pelembagaan sistem kepartaian, menurut Mainwaring setidaknya akan berdampak pada beberapa hal sebagai berikut (Mainwaring, 1998). *Pertama*, lemahnya pelembagaan sistem kepartaian menyebabkan lemahnya stabilitas politik karena peta konfigurasi kekuasaan baik di eksekutif dan legislatif akan selalu berubah dari satu periode ke periode selanjutnya. *Kedua*, lemahnya pelembagaan sistem kepartaian berakibat pada lemahnya

ikatan antara partai politik dengan akar rumput sehingga menyebabkan tingginya *electoral volatility* atau kondisi dimana masyarakat tidak memiliki ikatan partai politik atau *party id* sehingga selalu secara massif ada pergantian pilihan partai politik dalam perodesasi pemilu. *Ketiga*, lemahnya sistem kepartaian menyebabkan krisis legitimasi elite politik yang ada didalam pemerintahan, baik dilevel eksekutif maupun legislatif (Fadlurrohman, 2017). Organisasi internal partai politik di Indonesia belum dapat dikatakan baik mengingat cukup banyak terdapat kasus perselisihan internal partai politik yang kemudian berujung pada pemisahan kubu dan pembentukan partai politik baru (Brin.go.id, 2013).

Partai politik sendiri hanya akan menjadi kuat sejauh ia mampu melembagakan dukungan massa. Kekokohan partai politik mencerminkan wawasan dukungan dan derajat pelebagaan. Tanpa adanya pelebagaan partai politik, mustahil terbangunnya pelebagaan sistem kepartaian yang kokoh sehingga berdampak kepada pelebagaan demokrasi. Pelebagaan partai politik sebagai upaya pematangan demokrasi harus bermuara pada penguatan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan (*check and balances*).

Pelebagaan partai politik menurut Huntington (1973) adalah sebuah proses pengorganisasian dan

prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Jika partai politik telah berhasil memformulasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik dapat dikatakan terlebaga dengan baik. Huntington mengatakan setidaknya terdapat empat dimensi yang menunjukkan pelebagaan sebuah organisasi termasuk partai politik yaitu penyesuaian diri dan kekakuan, kompleksitas dan kesederhanaan, otonomi subordinasi serta kesatuan dan perpecahan.

Konsep pelebagaan partai politik dari Randall & Svåsand (2002) digunakan dalam tulisan ini untuk melihat proses pelebagaan, Randall membagi dua aspek pelebagaan yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Kedua aspek ini kemudian menghasilkan 4 derajat pelebagaann meliputi: derajat kesisteman (*systemnes*), derajat identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), dan derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*).

Penyebab pecahnya PKS dan melahirkan parti baru yaitu Gelora disebabkan perbedaan ideologi yang diinginkan masing-masing elit partai yaitu Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Anis Matta menginginkan ideologi pembaharuan, beberapa kader PKS melakukan penolakan karena lebih baik tetap konsisten untuk menjalankan visi

dan misi PKS dengan ideologi partai Islam. Akhirnya keputusan sejumlah pengurus PKS mengundurkan diri dan membentuk Partai Gelora.

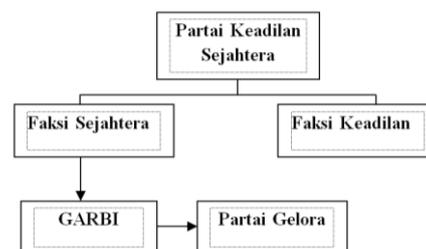
Perdebatan mengenai ideologi partai politik sehingga menyebabkan perpecahan partai menunjukkan rendahnya pelembagaan PKS. Dalam dimensi pelembagaan “*value infusion*” sebagaimana yang diungkapkan oleh Randal dan Svasand bahwa partai politik menjadi terinfusi (*infuse*) atau tertanam sebuah *value* (nilai) yang dijadikan sebagai referensi dalam setiap pengambilan keputusan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa partai politik bertindak sesuai dengan ideologinya. Sejalan dengan Budiatri et al (2017) bahwa ideologi partai merupakan penyebab konflik. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

### **Kehadiran Partai Gelora Sebagai Manajemen Konflik**

Kemunculan Partai Gelora dalam hitungan kurang dari satu tahun sejak dideklarasikan (2019), partai gelora sudah berdiri sebagai institusi resmi yang diakui undang-undang setahun berikutnya (2020), sebuah capaian spektakuler. Hal ini sebenarnya tidak aneh mengingat para kader partai ini sudah berpengalaman di dunia politik, ditambah sikap militansi berpolitik hasil internalisasi politik sebelumnya yang masih kuat mengakar. Kehadiran Gelora pada ranah politik dan publik karena adanya konflik yang menjerat PKS karena keretakan yang terjadi

pada internal PKS sejak lama, setidaknya sejak tahun 2004 hingga 2019. Disintegrasi kedua partai ini berawal mulai dari perbedaan pandangan mengenai orientasi partai politik antara Anis Matta dan Hilmi Aminudin. Dimana, Anis Matta kurang menyetujui adanya partai politik yang tertutup dan Anis Matta menghendaki PKS sebaiknya menjadi partai yang lebih terbuka agar dapat menyesuaikan diri dengan model demokrasi yang ada di Indonesia (Widyana, 2022). Lihat di gambar 1.

### **Gambar 2. Proses Munculnya Partai Gelora**



Sumber: (Penulis, 2022)

Selanjutnya, dari gambar 1, dijelaskan juga bahwa perbedaan kedua pandangan tersebut, menimbulkan menciptakan dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu Keadilan dan Sejahtera. Kubu Keadilan adalah kelompok yang ingin mempertahankan ideologi yang sudah diterapkan sejak awal berdirinya PKS, sedangkan kubu kelompok adalah mereka yang ingin mengubah pandangan PKS menjadi partai yang sifatnya lebih terbuka. Pada waktu itu, Anis Matta dan Fahri Hamzah mewakili kubu sejahtera

(Widyana, 2022). Dalam hal ini, pembentukan Partai Gelora menginginkan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia dalam bidang teknologi, ekonomi, dan militer. Karenanya, dalam mencapai hal itu perlu ada modernisasi dan keterbukaan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan keinginan pembaharuan tersebut, pada dasarnya mendapatkan penolakan yang keras dari beberapa kader PKS karena lebih baik tetap konsisten untuk menjalankan visi dan misi PKS dengan ideologi partai Islam daripada harus membentuk partai baru. Kemudian, ketiadaan wadah bagi mereka yang menginginkan ideologi perubahan tersebut, membuat sejumlah pengurus PKS mengundurkan diri dan membentuk Partai Gelora tersebut.

PKS merupakan konstinuitas ideologi, pemikiran, serta manhaj perjuangan PK. Bahkan ketika telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata dan artikulatif (Rahmat, 2008). Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berasaskan Islam partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, 2013). PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/aqidah, asas dan moralitas Islam

untuk mencapai tujuan terwujudnya. Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.

Meskipun demikian, adanya anggapan bahwasanya Partai Gelora hadir di tengah-tengah ketegangan antara PKS, tetapi hal ini bukan berarti Partai Gelora memiliki konflik dengan PKS. Salah satu pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan jika tujuan didirikannya partai tersebut untuk membantah semua dikotomi yang menyesatkan yang dibuat dari masa lalu, termasuk dikotomi antara Islam dan nasionalisme. Jadi, dengan adanya dikotomi-dikotomi tersebut yang sebaiknya harus segera dihapuskan, karena yang Islam tidak mau disebut sebagai tidak nasionalis; yang nasionalis tidak mau disebut dengan Islam atau tidak religius. Atas dasar itu, muncullah pembangunan bangsa yang satu, sebagaimana pokok pemikiran yang dibawa Partai Gelora. Dalam hal ini, tujuan dari pendirian Partai Gelora

adalah partai yang hadir sebagai jalan bagi orang-orang Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai solidaritas dan rasa nasionalisme untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang religius, tetapi memiliki sikap nasionalisme (Harahap, 2020). Dengan cara memaksimalkan potensi yang ada pada sumber daya manusia yang religius dan nasionalisme yang merupakan tujuan utama dari Partai Gelora (Widyana, 2022).

Anis Matta dikenal publik Indonesia berkat karir politiknya. Dia adalah seorang politikus dengan dua talenta dan pembicara yang luar biasa yang juga seorang penulis yang brilian. Alhasil, Partai Gelora milik Matta tak bisa dipisahkan dari partai besar namanya. Publik pada tahun 1990-an dan awal 2000-an akrab dengan kolom artikel Anis Matta yang muncul di banyak majalah Islam bergengsi: Sabili, Hidayatullah, Tarbawi, dan Saksi. Pilihan Matta untuk mendirikan Partai nasionalis berdasarkan Pancasila dapat dipahami jika kita memahami alasan di balik penulisan bukunya yang berjudul *Gelombang Ketiga Indonesia* pada tahun 2014. Anis melakukan periodisasi perjalanan sejarah Indonesia dengan diksi gelombang pertama, kedua dan ketiga (Argenti, 2021)..

Gelombang Indonesia Pertama mengacu pada berdirinya negara. Gelombang Indonesia Kedua mengacu pada pembentukan negara modern. Dan Gelombang Ketiga adalah penciptaan *The Next Indonesia*. Meskipun Matta

tidak secara eksplisit menyatakannya dalam teori gelombang ketiganya, Anis Matta percaya bahwa orang-orang gelombang ketiga memiliki tradisi, nilai, dan kepercayaan yang berbeda dari dua gelombang sebelumnya. Keyakinan dan nilai baru tumbuh selama periode ini. Gelombang politik ketiga biasanya tidak mewarisi ideologi politik pemerintahan otoriter masa lalu. Selain itu, perjuangan ideologis yang memecah belah di masa lalu jarang berdampak lama pada kelompok ini. Demokrasi parlementer negara tahun 1955 dan era multi-partai 1999 gagal menghasilkan identitas politik yang dominan. Dengan demikian, pusaran politik aliran berbasis identitas politik bisa dikatakan telah meredup. Sebuah kesimpulan yang sangat menarik dalam bukunya Anis Matta mengajurkan kolaborasi antar semua komponen bangsa berlatar identitas-identitas berbeda dalam membangun Indonesia kedepan, keinginan untuk merobohkan sekat-sekat pembatas. Wacana Ke-Islaman, Ke-modernan, dan Ke-indonesiaan menurut Anis Matta bukanlah entitas terpisah atau saling kontradiksi, tetapi harus hadir sebagai entitas bersama (Argenti, 2021)..

Pilihan gelora untuk menjadi partai politik terbuka yang harus siap menampung berbagai keragaman di masyarakat, siap berkolaborasi dan bekerjasama dengan semua elemen negara dengan tidak memandang latar belakang politik identitas, mengingat politik identitas tumbuh lebih kuat dan politis di negara kita. Partai yang lahir

dari konflik internal islam, Gelora memiliki keberanian besar menerima resiko ketika memutuskan berpisah dengan partai PKS. Hal ini karena lompatan perubahan dari kelompok Islamis ke terbuka. Sudah menjadi pilihan yang harus dijalankan dalam rumah tangga partai itu sendiri. Gelora harus mampu menyakinkan publik mengenai keterbukaan, bukan sebatas wacana tetapi praksis politik nyata (Argenti, 2021).

Pemilu tahun 2024 mendatang, akan menguji partai gelora, sejauh mana partai ini dapat meyakinkan pemilih nasionalis serta menyakinkan pemilih muslim. Mengingat pemilih partai sebelumnya (PKS) akan lebih banyak daripada gelora.

Sebagai manajemen konflik, dalam praktiknya strategi terbaik dalam pemecahan konflik internal partai yaitu negoisasi. Menurut McGuire (2004) negoisasi diartikan sebagai proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Definisi negoisasi dalam penyelesaian konflik ini berarti pendekatan yang paling umum digunakan untuk membuat keputusan dan mengelola sengketa. Negoisasi juga digunakan partai politik sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan konflik internalnya (Debora L, 2015).

Menurut Friedrich Nauman, dalam melakukan negoisasi kedua belah pihak harus dapat menyetujui suatu cara pemecahan agar penyelesaian konflik dapat tercapai.

Kemudian, kedua belah pihak harus bekerjasama sesuai dengan hal yang disepakati bersama. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sebuah konflik, negoisasi akan berhasil tergantung pada kepentingan posisi dan pilihan penyelesaian dari pihak pihak yang berkonflik. Selain itu, diperlukan keseimbangan, dimana pihak-pihak terkait saling menjelaskan tujuan dari adanya negoisasi dan keinginan pihak lain (Debora L, 2015).

Untuk merespon gejolak yang terjadi di tubuh partai politik antara PKS dengan Partai Gelora diakibatkan perbedaan ideologi dengan anggotanya, pelembagaan partai politik yang buruk serta manajemen yang buruk dalam tubuh partai terciptanya konflik internal. Tantangan besar yang dihadapi oleh partai politik termasuk PKS banyak menyangkut masalah internal. Sehingga dengan adanya manajemen konflik yang baik partai politik mampu melimalisir konflik di internal, sehingga partai politik mampu menjaga kepentingan partai dan mengelola negara dengan baik.

Konflik internal partai politik akan sulit diselesaikan dan sangat sulit mencari yang salah dan yang benar, karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dan kuat. Konflik yang terjadi dalam tubuh PKS terkait perbedaan idologi antara kedua kader akan terus berlanjut jika manajemen konflik tidak dilakukan. Kader partai politik harus memiliki kedewasaan dalam berpolitik sehingga partai mendapatkan solidaritas yang

kuat. Bentuk manajemen konflik yang diambil oleh pihak berkonflik yaitu dengan mendirikan partai baru yaitu gelora. Dengan kata lain, konflik tidak akan berlanjut dalam internal, karena ada pihak yang memutuskan pecah partai.

Jika setiap partai politik di Indonesia mampu menjalankan pelebagaan partai politiknya dengan baik, maka tentunya konflik internal kemungkinannya akan kecil terjadi. Tulisan ini melihat pelebagaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terbilang rendah, karena partai tidak dapat mengatasi konflik internalnya sendiri sehingga menciptakan perpecahan dan melahirkan partai baru (Partai Gelora). Kemudian, jika pelebagaan partai politik sudah baik, tentu akan berdampak juga terhadap perbaikan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Konflik politik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Konflik internal Partai dapat disimpulkan meliputi: *Pertama*, konflik internal PKS disebabkan keinginan Anis Matta untuk melakukan perubahan ideologi partai, pembaharuan itupun penolakan dari kader PKS. *Kedua*, pemetaan konflik dengan menggunakan model SIPABIO memberikan gambaran konflik yang terjadi dalam PKS, dan menunjukkan pihak berkonflik diantaranya Anis Matta dan Hilmi Aminudin beserta para kader PKS lainnya. Tindakan yang dilakukan

berkaitan dengan hasil akhir konflik ini yaitu *coercive action* dengan meninggalkan PKS dan mendirikan Partai Gelora dengan tidak melibatkan campur tangan pihak lain. *Ketiga*, pelebagaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terbilang rendah, karena partai tidak dapat mengatasi konflik internalnya sendiri sehingga menciptakan perpecahan dan melahirkan partai baru (Partai Gelora). Keempat, mendirikan partai baru yaitu gelora bisa dikatakan sebagai manajemen konflik agar konflik tidak berkelanjutan dan tidak perlu mengubah visi, misi dan ideologi PKS. Berdasarkan paparan tulisan ini, partai politik perlu membenahi pelebagaan partai politik yaitu dengan cara ideologi partai harus diperkuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdalla, A. (2002). *Understanding C.R. SIPABIO A Conflict Analysis Model*. Mary Kishimba. HYPPERLINK.
- Akmar, Z. (2019). Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS. *POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 89.
- Argenti, G. (2021). *Partai Baru Antara Gelora, Ummat, Dan Masyumi (Reborn) Oleh: Gili Argenti. September*.
- Arianto, A., Zetra, A., & Fadhilah, R. R. (2021). Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat. *Jurnal Terapan*

- Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 76–84. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1871>
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Bolin, N. (2007). New Party Entrance-Analyzing the Impact of Political Institutions. *Umeå Working Papers in Political Science*, 2.
- Brin.go.id. (2013). *Menakar Kualitas Institusionalisasi Partai Politik dalam Sistem Multipartai Di Indonesia*.
- Budiatri, A. P., Haris, S., Lili Romli, S. N., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2017). Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2).
- Budiatri, & Putri, A. (2018). *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- CNN Indonesia. (2019). *Anis Matta Akui Gelora Lahir karena Konflik Internal PKS*.
- CNN Indonesia. (2020). *Penggawa Partai Gelora: “Gerbong” PKS hingga Deddy Mizwar*.
- Databoks.katadata.co.id. (2022). *Ini Perolehan Suara PKS dalam Pemilu 1999-2019*.
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 3(2), 16–31.
- Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 15.
- Harahap, R. O. (2020). *Partai Gelora di Sumatera Utara Asal-Usul dan Perkembangannya*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Harmel, R., & Robertson, J. D. (1985). Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis. *International Political Science Review*, 6(4).
- Huntington, S. P. (1973). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- L, D. S. (2015). Manajemen konflik partai politik. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi*, VII(07), 17–20.
- Liliweri, A. (1997). *Komunikasi Antar Pribadi*. Citra Aditya Bakti.
- Mainwaring, S. (1998). Party Systems in The Third Wave. *Jurnal of Democracy*, 9(3).
- Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. (2013). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*. 1–39.
- Mardaya, Ubaidullah, & Ardiansyah. (2019). Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (Dpp) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)

- Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 4(4), 1–15.
- McGuire, R. (2004). Negotiation: an important life skill. *Pharmaceutical Journal*, 273(7306), 23–25.
- Nurhasim, M. (2013). Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10.
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi politik PKS (Partai Keadilan Sejahtera*. Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKIS).
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Jurnal Party Politics*, 8(1), 5–29.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus Politik dan Konflik Politik*. Dirjen Dikti Depdiknas.
- Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8(2), 95–118. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
- Sjamsuddin, N., Hamid, Z., & Pribadi, T. (1988). *Sistem Politik Indonesia*. Karunika (Universitas Terbuka).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Widyana, M. R. (2022). Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. *Jurnal PolGov*, 4(1), 125–168. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3861>
- Winardi. (1994). *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Mandar Maju